

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah wajib pajak yang ada di Kabupaten Cilacap yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *random sampling*. Terdapat 100 sampel kuesioner yang disebar kepada responden. Sampel ini yang digunakan untuk analisis data dan pengujian hipotesis. Distribusi sampel dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Distribusi Sampel

Keterangan	Jumlah	Persentase
kuesioner yang disebar	100	100%
kuesioner yang lengkap	100	100%
kuesioner yang digunakan	100	100%

Sumber : Hasil olah data primer, 2019

Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebanyak 100 kuesioner disebar kepada responden dengan 100 kuesioner yang lengkap dan layak digunakan menjadi sampel untuk dianalisis dalam penelitian ini.

Deskripsi responden digunakan untuk mengetahui latar belakang responden. Salah satu deskripsi responden yang digunakan adalah responden merupakan wajib pajak kendaraan bermotor. Deskripsi responden yang lain diantaranya : jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, dan pekerjaan.

Pada tabel 4.2 akan ditunjukkan responden yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor yang diteliti dalam penelitian ini :

Tabel 4.2
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Keterangan	Jumlah	Presentase
Ya	100	100%

Sumber : Hasil olah data primer, 2019

Dari tabel 4.2 menunjukkan bahwa 100 responden merupakan wajib pajak kendaraan bermotor dengan presentase 100%. Keseluruhan responden dapat digunakan dalam penelitian ini.

Pada tabel 4.3 akan ditunjukkan jenis kelamin dari keseluruhan responden yang diteliti dalam penelitian ini :

Tabel 4.3
Jenis Kelamin Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Laki- Laki	63	63%
Perempuan	37	37%
Jumlah	100	100%

Sumber : Hasil olah data primer, 2019

Dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden dari keseluruhan responden yang akan dianalisa dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 63% dari keseluruhan responden yang diteliti. Responden yang lain berjenis kelamin perempuan sebesar 37%.

Pada tabel 4.4 akan ditunjukkan data tentang umur dari keseluruhan responden yang akan diteliti dalam penelitian ini :

Tabel 4.4
Umur Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
< 30 tahun	42	42%
31 tahun – 40 tahun	26	26%
41 tahun – 50 tahun	20	20%
> 51 tahun	12	12%
Jumlah	100	100%

Sumber : Hasil olah data primer, 2019

Dari Tabel 4.4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini dibawah 30 tahun yaitu sebanyak 42 responden atau sebesar 42%. Responden yang berumur 30-40 tahun sebanyak 26 responden atau sebesar 26%, responden yang berumur 41-50 tahun sebanyak 20 responden atau sebesar 20%, dan responden yang berumur diatas 51 tahun sebanyak 12 responden atau sebesar 12%.

Pada tabel 4.5 akan ditunjukkan tingkat pendidikan terakhir dari keseluruhan responden yang diteliti dalam penelitian ini :

Tabel 4.5
Pendidikan Terakhir Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
SMA	32	32%
Diploma	27	27%
Sarjana	36	36%
Magister	4	4%
Lainnya	1	1%
Jumlah	100	100%

Sumber : Hasil olah data primer, 2019

Dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa jumlah responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA berjumlah 32 responden atau sebesar 32%, yang

memiliki tingkat pendidikan D3 berjumlah 27 responden atau sebesar 27%, yang memiliki tingkat pendidikan S1 berjumlah 36 responden atau sebesar 36%, yang memiliki tingkat pendidikan S2 berjumlah 4 responden atau sebesar 4% dan yang memiliki tingkat pendidikan lainnya berjumlah 1 responden atau sebesar 1%.

Pada tabel 4.6 akan ditunjukkan jenis pekerjaan dari keseluruhan responden yang diteliti dalam penelitian ini.

TABEL 4.6
Pekerjaan Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
PNS	15	15%
Swasta	30	30%
Petani	2	2%
Wirausaha	15	15%
Pedagang	3	3%
Lainnya	35	35%
Jumlah	100	100%

Sumber : Hasil olah data primer, 2019

Dari tabel 4.6 menunjukkan bahwa yang bekerja sebagai PNS berjumlah 15 responden atau sebesar 15%, yang bekerja di swasta berjumlah 30 responden atau sebesar 30%, yang bekerja sebagai petani berjumlah 2 responden atau sebesar 2%, yang bekerja sebagai wirausaha berjumlah 15 responden atau sebesar 15%, yang bekerja sebagai pedagang berjumlah 3 responden atau sebesar 3% dan yang bekerja lainnya berjumlah 35 responden atau sebesar 35%.

4.2 Uji Statistik Deskriptif

Analisis ini menggunakan nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi atas jawaban responden setiap variabel. Penilaian analisis deskriptif memberikan penilaian tentang tinggi rendahnya persepsi wajib pajak kendaraan

bermotor di Kabupaten Cilacap. Hasil Uji analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Mean_KWP	100	1.5	4.0	3.201	.4691
Mean_KSD	100	2.2	4.0	3.180	.4192
Mean_PP	100	1.8	4.0	3.022	.4057
Mean_AKP	100	1.1	4.0	2.936	.4213
Mean_SS	100	2.3	4.0	3.192	.3966
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Hasil olah data primer, 2019

Dari tabel 4.2 menunjukkan bahwa n merupakan jumlah responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden. Nilai minimum adalah skor terendah dalam penilaian kuesioner, sedangkan nilai maksimum adalah skor tertinggi dari penilaian kuesioner. Nilai mean adalah penjumlahan antara nilai minimum dan nilai maksimum dibagi 2. Nilai standar deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat dari selisih nilai rata dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Semakin besar nilai standar deviasi berarti bahwa jawaban responden terhadap pernyataan kuesioner semakin bervariasi, sebaliknya semakin kecil nilai standar deviasi maka variasi jawaban responden semakin kecil.

Dari tabel 4.2 dapat disimpulkan statistik dari masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 2,2 dan nilai maksimum sebesar 4,0. Nilai rata-rata (mean) jawaban responden

mengenai variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 3,180. Hal ini menunjukkan rata-rata kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap sudah baik. Standar deviasi variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai 0,4192 yang berarti jawaban responden mengenai pernyataan kuesioner bervariasi.

2. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 1,8 dan nilai maksimum sebesar 4,0. Nilai rata-rata (mean) jawaban responden mengenai variabel pengetahuan perpajakan adalah sebesar 3,022. Hal ini berarti bahwa rata-rata pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap. Standar deviasi variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai 0,4057 yang berarti jawaban responden mengenai pernyataan kuesioner bervariasi.
3. Variabel akuntabilitas pelayanan publik memiliki nilai minimum sebesar 1,1 dan nilai maksimum sebesar 4,0. Nilai rata-rata (mean) jawaban responden mengenai variabel akuntabilitas pelayanan publik adalah sebesar 2,936. Hal ini berarti bahwa rata-rata penilaian oleh wajib pajak terhadap akuntabilitas pelayanan publik yang diberikan oleh petugas SAMSAT. Standar deviasi variabel akuntabilitas pelayanan publik memiliki nilai 0,4213 yang berarti jawaban responden mengenai pernyataan kuesioner bervariasi.
4. Variabel sosialisasi memiliki nilai minimum sebesar 2,3 dan nilai maksimum sebesar 4,0. Nilai rata-rata (mean) jawaban responden mengenai variabel sosialisasi adalah sebesar 3,192. Hal ini berarti bahwa

rata-rata penilaian wajib pajak mengenai sosialisasi yang berikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap. Standar deviasi variabel sosialisasi memiliki nilai 0,3966 yang berarti jawaban responden mengenai pernyataan kuesioner bervariasi.

5. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 1,5 dan nilai maksimum sebesar 4,0. Nilai rata-rata (mean) jawaban responden mengenai variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 3,201. Hal ini berarti bahwa rata-rata kepatuhan wajib pajak yang dimiliki wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap. Standar deviasi variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai 0,4691 yang berarti jawaban responden mengenai pernyataan kuesioner bervariasi.

4.3 Uji Kualitas Data

4.3.1 Uji Validitas

Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil korelasi *bivariate* dapat diketahui dengan melihat output *Cronbach's Alpha* yang ada pada kolom *Correlated Item – Total Correlation*. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dengan kriteria pengujian yang dibuktikan oleh perhitungan apabila nilai *pearson correlation* (R hitung) < R tabel maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid, sedangkan apabila nilai *pearson correlation* (R hitung) > R tabel maka butir pertanyaan dapat dikatakan valid. Uji validitas pada penelitian ini dari variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, akuntabilitas pelayanan publik, sosialisasi, dan kepatuhan wajib pajak yang dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.3.1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	ksd1	0.749	0.1966	Valid
	ksd2	0.734	0.1966	Valid
	ksd3	0.695	0.1966	Valid
	ksd4	0.661	0.1966	Valid
	ksd5	0.582	0.1966	Valid
Pengetahuan Pajak	pp1	0.777	0.1966	Valid
	pp2	0.751	0.1966	Valid
	pp3	0.791	0.1966	Valid
	pp4	0.694	0.1966	Valid
	pp5	0.748	0.1966	Valid
	pp6	0.486	0.1966	Valid
Akuntabilitas Pelayanan Publik	akp1	0.515	0.1966	Valid
	akp2	0.630	0.1966	Valid
	akp3	0.728	0.1966	Valid
	akp4	0.795	0.1966	Valid
	akp5	0.852	0.1966	Valid
	akp6	0.767	0.1966	Valid
	akp7	0.832	0.1966	Valid
	akp8	0.844	0.1966	Valid
Sosialisasi	ss1	0.687	0.1966	Valid
	ss2	0.665	0.1966	Valid
	ss3	0.737	0.1966	Valid
	ss4	0.735	0.1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	kwp1	0.684	0.1966	Valid
	kwp2	0.762	0.1966	Valid
	kwp3	0.720	0.1966	Valid
	kwp4	0.610	0.1966	Valid

Sumber : Hasil olah data primer, 2019

Dari data tabel 4.3.1 menunjukkan bahwa nilai R Hitung dari semua butir pernyataan pada tiap variabel menunjukkan hasil yang lebih besar dari R Tabel yaitu sebesar 0.1966. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

pernyataan-pernyataan mengenai kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, akuntabilitas pelayanan publik, sosialisasi dan kepatuhan wajib pajak adalah valid.

4.3.2 Uji Realibilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pengukuran one shot atau pengukuran sekali saja. *One shot* atau pengukuran sekali adalah pengukuran hanya sekali dan hasilnya dibandingkan dengan pernyataan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pernyataan dengan teknik *Cronbach's Alpha*. *Cronbach's Alpha* adalah tolak ukur yang digunakan untuk menghubungkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 (Ghozali, 2013).

Tabel 4.3.2
Hasil Uji Realibilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,717	Realibel
Pengetahuan Pajak	0,807	Realibel
Akuntabilitas Pelayanan Publik	0,888	Realibel
Sosialisasi	0,658	Realibel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,621	Realibel

Sumber : Hasil olah data primer, 2019

Dari data tabel 4.3.2 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* semua variable menunjukkan hasil yang lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variable kesadaran wajib pajak, pengetahuan

pajak, akuntabilitas pelayanan publik, sosialisasi, dan kepatuhan wajib pajak reliable untuk digunakan dalam penelitian.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi mempunyai nilai residu yang berdistribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Uji *Kolmogorov Smirnov* digunakan karena memiliki beberapa keunggulan diantaranya digunakan untuk penelitian kuantitatif dan dapat digunakan untuk menguji dengan jumlah data yang banyak. Dengan Uji *Kolmogorov Smirnov* jika nilai probabilitas ≥ 0.05 maka data residual berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai probabilitas < 0.05 maka data residual tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2013).

Tabel 4.3.1
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.27133459
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.049
	Negative	-.088
Test Statistic		.088
Asymp. Sig. (2-tailed)		.053 ^c

Sumber : Hasil olah data primer, 2019

Dari data tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.053 yang lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

4.4.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas merupakan pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara variabel bebas. Dikatakan tidak adanya multikolonieritas dalam model regresi berganda apabila nilai Tolerance $> 0,1$ dan *Variance Inflating Factor* (VIF) < 10 (Ghozali, 2013).

Tabel 4.3.2
Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X ₁	0.642	1.557
X ₂	0.598	1.671
X ₃	0.421	2.377
X ₄	0.422	2.369

Sumber : Hasil olah data primer, 2019

Dari data tabel 4.3.2 menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan nilai tolerance $> 0,1$ dan VIF < 10 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas dan tidak terjadi multikolonieritas, sehingga seluruh variabel bebas tersebut dikatakan baik dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu pengujian asumsi klasik yang harus ada dalam model regresi linear. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan *variance* residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas maka dilakukan Uji *Glejser*. Dalam Uji *Glejser* akan dihasilkan nilai signifikansi dari masing-masing variabel. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$, maka variabel tersebut tidak heteroskedastisitas.

Tabel 4.3.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Sig.
1	(Constant)	0.229
	Mean_KSD	0.135
	Mean_PP	0.976
	Mean_AKP	0.649
	Mean_SS	0.134

Sumber : Hasil olah data primer, 2019

Dari data tabel 4.3.3 menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai nilai signifikansi $>$ dari tingkat signifikansi 5% atau $> 0,05$ oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dan tergolong data yang baik.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Hasil Uji Hipotesis tanpa Variabel Moderasi

Dalam pengujian hipotesis tanpa variabel moderasi dilakukan dengan uji regresi linear berganda. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5.1
Hasil Uji Regresi

Variabel	Koefisien Regresi	Sig.	R Square	Sig. F
Konstanta	0,901	0,015	0,298	0,000
Mean_KSD	0,361	0,003		
Mean_PP	0,206	0,110		
Mean_AKP	0,181	0,111		

Sumber : Hasil olah data primer, 2019

4.5.1.1 Hasil Persamaan Regresi

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.5.1 dapat diinterpretasikan persamaan regresi sebagai berikut:

$$KWP = 0,901 + 0,361(X1) + 0,206(X2) + 0,181(X3)$$

Dari persamaan regresi diatas dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang positif antara kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan pajak (X2), akuntabilitas pelayanan publik (X3) dengan kepatuhan wajib pajak (Y). Jika semua variabel bebas diasumsikan tidak akan mengalami perubahan konstanta atau nol, maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0,901. Apabila kesadaran wajib pajak meningkat satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,361. Apabila pengetahuan pajak meningkat satu satuan maka kepatuhan

wajib pajak akan meningkat sebesar 0,206 dan apabila akuntabilitas pelayanan publik meningkat satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,181.

4.5.1.2 Uji Model

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.4.1 nilai R square (R^2) sebesar 0,298, yang berarti bahwa 29,8 % variasi perubahan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan sisanya sebesar 70,2% dijelaskan variabel lain diluar model. Nilai signifikan F sebesar $0,000 < 0,05$ maka model penelitian ini layak digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

4.5.1.3 Hasil Uji Hipotesis

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai koefisien yang positif sebesar 0,361 dan signifikan sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05. Artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap. Hal ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap. Kepatuhan wajib pajak meningkat berarti wajib pajak sadar dan mengetahui bahwa pajak digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Ilhamsyah et al., 2016), (Agustiningsih, 2016), (Riadita & Saryadi, 2019), (Susilawati & Budiarta, 2013), (Mahaputri & Noviari, 2016), (Adi & Yushita, 2018), (Aswati et al., 2018), (Septarini, 2015), (Wardani & Rumiyatun, 2017) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis kedua yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai koefisien yang positif sebesar 0,206 dan signifikan sebesar 0,110 lebih besar dari 0,05. Artinya pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak masih rendah.

Menurut hasil studi UNESCO (*The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) pada tahun 2016, Indonesia berada diperingkat 60 dari 61 negara didunia dengan tingkat literasi yang rendah. Rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia berdampak pada informasi yang akan disampaikan oleh Dirjen Pajak atau KPP tidak tersampaikan secara maksimal. Wajib pajak dalam bertindak dan mengambil keputusan dalam membayar pajak mereka berdasarkan pada tingginya pengetahuan yang wajib pajak miliki. Dengan tingkat pengetahuan wajib pajak yang rendah akan berakibat pada rendahnya penerimaan pajak negara. Tetapi, dari hasil penelitian tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan atau kemauan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Rumiya, 2017) menemukan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai koefisien yang positif sebesar 0,181 dan signifikan sebesar 0,111 lebih besar dari 0,05. Artinya akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas SAMSAT masih kurang optimal dikarenakan persepsi wajib pajak kepada petugas SAMSAT dalam memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada wajib pajak yang masih rendah dengan melihat rata-rata penilaian butir pernyataan kuesioner akuntabilitas pelayanan publik. Meskipun sudah dipermudah dengan adanya pelayanan secara *online*, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui informasi tersebut. SAMSAT keliling yang dilakukan untuk menjangkau daerah yang jauh dengan kantor SAMSAT juga tidak memberikan pelayanan yang optimal karena jadwal yang tidak menentu sehingga wajib pajak harus tetap membayar pajak langsung ke kantor SAMSAT. Dengan demikian tingkat akuntabilitas pelayanan publik yang dilakukan oleh SAMSAT tidak mempengaruhi wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Siregar, 2018), (Aswati et al., 2018) menemukan bahwa

akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.5.2 Hasil Uji Hipotesis dengan Variabel Moderasi

Dalam pengujian hipotesis dengan variabel moderasi dilakukan dengan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5.2
Hasil Uji Regresi Moderasi

Variabel	Koefisien Regresi	Sig.	R Square	Sig. F
Konstanta	1,082	0,463	0,679	0,000
Mean_KSD	-0,960	0,129		
Mean_PP	0,630	0,342		
Mean_AKP	-0,064	0,879		
Mean_SS	0,777	0,107		
KSDSS	0,369	0,064		
PPSS	-0,147	0,471		
AKPSS	-0,145	0,324		

Sumber : Hasil olah data primer, 2019

4.5.2.1 Hasil Persamaan Regresi

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.5.2 dapat diinterpretasikan persamaan regresi sebagai berikut:

$$KWP = 1,082 - 0,960(X1) + 0,630(X2) - 0,064(X3) + 0,777(X4) + 0,369(X1X4) - 0,147(X2X4) - 0,145(X3X4)$$

Dari persamaan regresi diatas dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang positif antara pengetahuan pajak (X2), sosialisasi (X4), interaksi kesadaran wajib pajak dengan sosialisasi (X1X4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dan

hubungan yang negatif antara kesadaran wajib pajak (X1), akuntabilitas pelayanan publik (X3), interaksi pengetahuan pajak dengan sosialisasi (X2X4), interaksi akuntabilitas pelayanan publik dengan sosialisasi (X3X4) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Jika semua variabel bebas diasumsikan tidak akan mengalami perubahan konstanta atau nol, maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 1,082. Apabila kesadaran wajib pajak meningkat satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar -0,960. Apabila pengetahuan pajak meningkat satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,630. Apabila akuntabilitas pelayanan publik meningkat satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar -0,064. Apabila sosialisasi meningkat satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,777. Apabila interaksi kesadaran wajib pajak dengan sosialisasi meningkat satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,369. Apabila interaksi pengetahuan pajak dengan sosialisasi meningkat satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar -0,147. Apabila interaksi akuntabilitas pelayanan publik dengan sosialisasi meningkat satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar -0,145.

4.5.2.2 Hasil Uji Model

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.5.2 nilai R square (R^2) sebesar 0,679, yang berarti bahwa sosialisasi memoderasi kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik sebesar 67,9% dan sisanya sebesar 32,1% dijelaskan variabel lain diluar model. Nilai signifikan F sebesar $0,000 < 0,05$ maka model penelitian ini layak digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen dan variabel moderasi terhadap variabel dependen.

3.6.1.1 Hasil Uji Hipotesis

H4 : Sosialisasi Memoderasi Pengaruh Hubungan antara Kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis keempat yang menyatakan sosialisasi memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai signifikansi kesadaran wajib pajak sebesar $0,129 > 0,05$ dan nilai koefisien regresi interaksi antara kesadaran wajib pajak dengan sosialisasi yang positif sebesar 0,369 dan signifikan sebesar 0,064 lebih besar dari 0,05. Artinya interaksi kesadaran wajib pajak dan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan sosialisasi merupakan moderasi potensial

(*Homologiser Moderator*). Hal ini berarti bahwa dengan adanya sosialisasi tidak memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat khususnya wajib pajak tidak mempengaruhi kesadaran kepada wajib pajak akan pentingnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Susanti & Khairani, 2018) menemukan bahwa sosialisasi tidak mempengaruhi hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan kemauan membayar pajak.

H5 : Sosialisasi Memoderasi Pengaruh antara Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis kelima yang menyatakan sosialisasi memperkuat hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai signifikansi pengetahuan pajak sebesar $0,342 > 0,05$ dan nilai koefisien regresi interaksi antara pengetahuan pajak dengan sosialisasi yang negatif sebesar $-0,147$ dan signifikan sebesar $0,471$ lebih besar dari $0,05$. Artinya interaksi pengetahuan pajak dan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor dan sosialisasi merupakan moderasi potensial (*Homologiser Moderator*). Hal ini berarti dengan adanya sosialisasi tidak memperkuat hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Handayani & Tambun, 2016) yang menemukan bahwa sosialisasi memperlemah pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena hasil yang diperoleh tidak berpengaruh signifikan dan interaksi moderasi yang hasilnya adalah bukan moderasi.

H6 : Sosialisasi Memoderasi Pengaruh antara Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis keenam yang menyatakan sosialisasi memperkuat hubungan antara akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai signifikansi akuntabilitas pelayanan publik sebesar 0,879 dan nilai koefisien regresi interaksi antara akuntabilitas pelayanan publik dengan sosialisasi yang negatif sebesar -0,145 dan signifikan sebesar 0,324 lebih besar dari 0,05. Artinya interaksi akuntabilitas pelayanan publik dan sosialisasi tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan sosialisasi merupakan moderasi potensial (*Homologiser Moderator*). Hal ini berarti dengan adanya sosialisasi tidak memperkuat hubungan antara akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap.

Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tambun, 2016) yang menemukan bahwa sosialisasi perpajakan tidak mampu memperkuat pengaruh dari pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.